PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kompas Hari: Kamis Tanggal: 11 September 2008 Halaman: A

KESEJAHTERAAN GURU

Selisih Gaji Negeri dan Swasta Capai Rp 1 Juta

YOGYAKARTA, KOMPAS — Kesenjangan pendapatan antara guru swasta dan guru pegawai negeri sipil makin besar. Dengan beban mengajar sama, selisih pendapatan berkisar Rp 500.000 hingga Rp 1 juta. Jurang pendapatan ini berpotensi menurunkan kualitas layanan pendidikan.

Ketua Dewan Pendidikan DI Yogyakarta Wuryadi mengemukakan, kesenjangan tersebut berpotensi membuat guru non-pegawai negeri sipil (PNS) merasa kurang dihargai. Akibatnya, partisipasi mereka pun tak maksimal. "Padahal, pendidikan di Yogyakarta masih tergantung pada sekolah swasta maupun pada guru non-PNS," tuturnya, Rabu (10/9) di Yogyakarta.

Menurut Wuryadi, jumlah sekolah dan guru negeri di DIY belum mampu menampung seluruh anak usia sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah guru PNS dan non-PNS hampir sebanding, yaitu 32.219 PNS dan 25.241 non-PNS.

Akibatnya, berapa pun besar dana kesejahteraan untuk guru negeri tidak akan memperbaiki kualitas layanan pendidikan apabila partisipasi guru non-negeri tetap tidak maksimal. "Kalau pemerintah melihat pendidikan secara utuh, maka harus ada juga kompensasi untuk para guru swasta," kata Wuryadi.

Kesenjangan pendapatan yang ada saat ini saja, lanjut Wuryadi, telah membuat dunia pendidikan Indonesia mengalami tekanan terutama di bidang kesejahteraan. Bila kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hanya ditujukan untuk guru PNS, maka tekanan itu akan lebih besar lagi.

Diimbangi

Oleh karena itu, tambah Wuryadi, rencana pemerintah untuk meningkatkan pendapatan guru negeri hingga minimal sebesar Rp 2 juta per bulan pada tahun 2009 perlu diimbangi juga dengan peningkatan kesejahteraan untuk para guru swasta. Rencana tersebut bisa menambah besar kesenjangan pendapatan yang ada.

Kesenjangan pendapatan tersebut terutama terlihat di sekolah swasta yang tidak memiliki sumber dana kuat. Kesenjangan semakin tak dapat dihindari bila guru yang mengajar dalam satu sekolah terdiri atas guru PNS dan non-PNS.

Di SMP 17-1 Yogyakarta, misalnya, terdapat sembilan guru swasta dan lima guru negeri. "Untungnya belum menjadi masalah di sekolah kami, semua masih kerja dengan lapang dada," kata Kepala SMP 17-1 Sulistiyanto.

Sulistiyanto mengungkapkan, insentif dari pemerintah kota dan provinsi cukup membantu para guru non-PNS di sekolah yang dia pimpin. Sulistiyanto berharap pemerintah juga memerhatikan fasilitas di sekolah swasta. Fasilitas yang memadai juga akan meningkatkan kinerja guru. (IRE)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaa	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005